

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT TAHUN 2019

The Implementation of PKH Program at Ranah Ampek Sub-District, South Pesisir
Regency, Western Sumatera in 2019

Ahmad Muksin¹ & Wiwit Mayuna Ahta²

Department of Public Administration
Universitas Nasional

Abstract

This study aims to identify and describe the implementation of the Family of Hope Program (Program Keluarga Harapan/ PKH) in Ranah Ampek Hulu District, Pesisir Selatan Regency, seen from the theory of policy implementation according to Van Meter and Van Horn, namely Policy standards and objectives/ measures and policy objectives. Resources, Characteristics of the implementing organization, the attitude of the implementers, Communication between related organizations and implementation activities, Social and economic environment. The research method used is descriptive qualitative. There were 4 informants, namely the Kasi of Social Welfare, Ranah Ampek Hulu District, PKH Facilitators, Ranah Ampek Hulu District, Wali Nagari Kubu Tapan, and 1 person KPM PKH. The data source used is primary data obtained directly from informants, while secondary data comes from existing data in Ranah Ampek Hulu District, documents related to the problem to be studied. The results showed that the implementation of the Family Hope Program in Ranah Ampek Hulu Subdistrict was running quite well, but there are still a number of things that need to be improved so that the effectiveness of the program implementation will increase.

Keywords: Program Keluarga Harapan (PKH), policy implementation.

A. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun

¹ Wakil Dekan I FISIP UNAS

² Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional

sehingga kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat pada September 2019 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mencapai 343,09 ribu orang (6,29 persen). Persentase penduduk miskin pada Maret 2019, di daerah perkotaan sebesar 4,76 persen, sementara di daerah perdesaan sebesar 7,88 persen. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah masih mempunyai tanggungan dalam memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakatnya. Maka dari itu perlu adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah guna mengurangi angka kemiskinan.

Pengurangan angka kemiskinan merupakan sebuah Langkah kebijakan yang krusial dan mesti dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana pembangunan yang bertanggung jawab agar tercapainya kehidupan sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Program-program yang dimaksudkan untuk pengentasan kemiskinan telah diselenggarakan oleh banyak negara berkembang. Di Indonesia sendiripun program yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan, seperti: pembangunan desa tertinggal, pembangunan tingkat kampung, gerakan terpadu untuk pengentasan kemiskinan, serta banyak program terdahulu lainnya yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, pemerintah Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, ikut melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai langkah untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial agar dapat meringankan beban rumah tangga miskin agar mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, agar tercapainya cita-cita program yakni untuk memberantas kemiskinan.

Pada tahun 2007 Negara Indonesia mulai menggencarkan program PKH di 7 provinsi, dan pertama kali diluncurkan di Sumatera Barat pada juli 2007 sebagai tahap uji coba dengan harapan bahwa program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan berkesinambungan. Peluncuran PKH ini berdasar pada permasalahan yang terjadi, yaitu masih banyaknya jumlah masyarakat miskin dan memiliki sumber daya manusia yang rendah, untuk itu dibuatlah Program Keluarga Harapan ini agar mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial.

Merujuk pada keadaan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kecamatan Ranah Ampek hulu yang memiliki angka penduduk miskin cukup tinggi serta memiliki kendala dalam Pendidikan anak-anaknya. Badan Pusat Statistik telah mencatat bahwa Kabupaten Pesisir selatan Sumatera Barat yang merupakan salah satu provinsi dengan cakupan wilayah yang luas di Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sumatera Barat ialah Kabupaten Pesisir selatan yang pada bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Pesisir Selatan sebanyak 36,51 ribu orang (7,88 persen), bertambah sebanyak 1,59 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 34,92 ribu orang (7,59 persen). Salah satu tujuan akhir PKH adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. 8 Dalam pelaksanaan program tentunya tidak luput dari hambatan atau hal-hal yang dapat mengganggu jalannya program. Seperti yang dilansir oleh media berita Fajar Indonesia Network dengan tanggal publikasi 11 Desember 2019 yang menyatakan bahwa Anggota Ombudsman Ahmad Suadi mengatakan pihaknya menemukan malaadministrasi dalam penyelenggaraan PKH yang dilakukan Kemensos dan Himpunan Bank Negara (Himbara). Salah satunya adalah lambatnya proses penanganan pengelolaan pengaduan di tingkat daerah. 9 Terdapat juga hambatan yang berkenaan dengan PKH selama ini, ialah : mengenai kevalidan data kelayakan peserta PKH yang dinilai bukan RTSM, sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai RTSM namun tidak terdata dan tidak masuk sebagai calon peserta PKH. Hal ini menunjukkan bahwa pendataan dan penentuan sasaran dari program ini belum tepat.

Kedua, bantuan yang diterima oleh para peserta PKH dipergunakan untuk mencukupi kehidupan rumah tangga sehari-hari, hal ini menunjukkan bahwa dana bantuan yang diberikan belum tepat sasaran dalam hal penggunaannya, melenceng dari apa yang ditargetkan. Dilansir dari media berita Tempo.com tanggal publikasi 11 Desember 2011 yang menyebutkan bahwa Menteri Sosial Juliari batubara menyatakan bahwa terdapat kendala dalam proses penyaluran anggaran untuk Program Keluarga Harapan, kendala tersebut mengenai akurasi data penerima PKH yang mana masih ada keluarga yang tidak layak menerima bantuan PKH akan tetapi datanya tercantum sebagai keluarga penerima PKH. Hal ini juga dikabarkan oleh media Kompasiana tanggal publikasi 26 Juni 2019 yang menyatakan bahwa banyak keluarga yang dirasa tidak layak menerima bantuan PKH, dan juga banyak RTSM yang tidak terdaftar sebagai penerima PKH. Terdapat berbagai indikasi masalah yang di laporkan oleh media berita Indonesia mengenai implementasi program PKH. Dalam media Tempo.co disebutkan oleh Juliari Batubara selaku Menteri Sosial bahwa masih terdapat masalah dalam penyaluran anggaran dalam PKH. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh media berita Kompasiana dan Fajar Indonesia Network yang menyebutkan permasalahan PKH terletak pada sasaran RTSM yang belum tepat dan terdapat kesalahan maladministrasi dalam penyelenggaraan PKH Pada kasus penerapan program PKH di Kecamatan Ranah Ampek Hulu yang mana kecamatan tersebut memiliki jumlah masyarakat miskin atau RTSM paling banyak diantara kecamatan lainnya. Hal itu disebabkan wilayah ini merupakan wilayah persinggahan para transmigran dan juga merupakan perbatasan dengan Kabupaten Mukomuko.

Dengan diberlakukannya PKH di Kecamatan Ranah Ampek Hulu maka perlu adanya koordinasi dari pihak terkait, agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai sasaran dan meminimalisir kemungkinan yang tidak diinginkan untuk terjadi. Bantuan PKH ini diharapkan dapat membantu RTSM di kecamatan Ranah Ampek Hulu agar dapat memenuhi keberlangsungan hidupnya.

Hal urgensi yang terdapat dalam penelitian ini ialah peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dilapangan terkait pelaksanaan PKH pada tahun 2019. Serta

berangkat dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul “Implementasi PKH di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tahun 2019”.

B. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan wawancara mendalam, dan menggambarkan bagaimana implementasi PKH yang berlangsung di lokasi penelitian. Hasil wawancara yang didapat untuk kemudian diolah dan akan diperoleh data-data dan fakta-fakta untuk mendukung penelitian ini. Lokus dari penelitian ini ialah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Kabupaten Pesisir selatan Sumatera Barat.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat penelitian yang utama. Selanjutnya digunakan Teknik deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana implementasi program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Ranah Ampek Hulu, Kabupaten Pesisir Selatan.. Informan dalam penelitian ini adalah Kasi Kesos Kecamatan Ranah Ampek Hulu, Pendamping PKH Kecamatan Ranah Ampek Hulu, Wali Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu. Informan biasa adalah KPM PKH

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan sasaran kebijakan Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Ranah Ampek Hulu dapat dinyatakan telah tepat sasaran dan tujuan dari pelaksanaan PKH telah tercapai dengan baik mulai dari mekanisme dan prosedur, kesesuaian jumlah bantuan yang diterima oleh peserta telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan PKH, begitu juga dengan manfaat dana PKH yang sudah meringankan beban peserta PKH baik dibidang pendidikan maupun kesehatan serta kesejahteraan sosial. Akan tetapi masih perlu ada perbaikan mengenai KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan untuk dihapuskan datanya sebagai penerima PKH, begitupun sebaliknya.

Sumber daya dalam pelaksanaan PKH di kecamatan Ranah Ampek Hulu sudah sesuai dengan yang diminta sebagai persyaratan untuk menjadi pendamping PKH, berpendidikan, informatif dan dapat menjadi jembatan yang baik dalam berkomunikasi dengan para KPM yang beragam karakter. Serta dalam menjalankan tugasnya, mereka juga mendapatkan pelatihan langsung dari Kementerian Sosial RI, terkait pelaksanaan PKH.

Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari koordinasi antar pendamping PKH baik untuk pembahasan teknis pelaksanaan maupun diskusi mengenai data KPM PKH. Dan juga komunikasi antar pendamping PKH dan KPM PKH sudah terjalin sangat baik, hal ini disampaikan

langsung oleh KPM PKH dan terlihat dari tidak adanya keluhan dari KPM terkait pelaksanaan program ini, hal ini tidak terlepas dari peran komunikasi yang baik antar pendamping dan KPM PKH.

Dalam indikator sikap pelaksana, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap agen pelaksana PKH di Kecamatan Ranah Ampek Hulu sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikemukakan langsung oleh beberapa informan selaku KPM PKH yang menyatakan bahwa sikap pendamping PKH terhadap anggota KPMnya sudah berperan sangat baik, hal ini tercermin dalam setiap sosialisasi dan kegiatan pertemuan PKH lainnya bahwa pendamping PKH Kecamatan Ranah Ampek Hulu sudah sangat mengayomi dan bersikap informatif kepada para anggota KPM PKHnya.

Pada indikator karakteristik agen pelaksana ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan penilaian peneliti terhadap agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Ranah Ampek Hulu. Agen pelaksanaan yang terstruktur mulai dari tingkatan pusat dan berjenjang kebawah sampai pada tingkatan pendamping PKH. Kerja sama yang terjalin antar sesama agen pelaksana sangat baik dalam segi koordinasi dan kontrol terhadap satu sama lain, sehingga apabila terdapat satu kesalahan dari satu agen pelaksana dapat diatasi secara cepat.

Dalam indikator lingkungan sosial dan ekonomi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Hal ini tercermin dalam kondisi sosial baik ekonomi para KPM PKH, dari sisi ekonomi para KPM PKH biasanya bekerja sebagai buruh tani di lahan orang lain, pemasukan dari pekerjaan sebagai buruh tani tidak tetap sebab dalam satu hari bisa saja tidak ada pemasukan karena tidak ada panggilan dari pemilik lahan untuk bekerja, sehingga tidak ada pemasukan. Dilihat dari sisi sosial, kondisi rumah yang dihuni KPM PKH bisa dikatakan tidak layak huni, badan rumah yang terbuat dari kayu dan usia rumah yang sudah puluhan tahun membuatnya sudah tidak layak huni, ditambah lagi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, ukuran rumah yang dihuni oleh 3 orang akan tetapi dihuni oleh 6 orang.

D. KESIMPULAN

Implementasi program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Ranah Ampek Hulu telah berjalan dengan baik. Rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal pelaksanaan program, monitoring program dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada sedikit kendala mengenai sasaran dalam penetapan warga sebagai KPM, yakni masih ada beberapa warga yang dianggap tidak layak ditetapkan sebagai KPM PKH akan tetapi dalam kenyataannya warga tersebut menerima bantuan dana PKH.

E. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Arif Citra Permana, Cahyo Sasmito, Cakti Indra Gunawan. jurnal. "Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Untuk

Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)” Pada Tahun 2018.

- Bugin, B. (2003). *Analisis data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cahyo Sasmito, Ertien Rining Nawangsari. Jurnal. “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu” Pada Tahun 2019.
- G, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princnton Universiyty Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasikun. (1993). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Neilson, S. (2011). *Knowledge Utilization and Public Policy Processes*.
- Siagian, S. P. (1985). *Filsafat Administrasi*. Jakarta.
- Sjafari, A. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khodziah Isnaini Kholif. Skripsi. “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” Pada Tahun 2014.
- Slamet Agus Purwanto, Sumartono Sumartono, Muhammad Makmur. Jurnal. “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)” Pada Tahun 2013.
- Sugiyono. (2010). *memahami penelitian kualitatif*. bandung: alfabetha.
- Suharto, e. (2009). *membangun masyarakat memberdayakan masyarakat*. bandung: PT refika aditama.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tirtado Sinaga. Skripsi “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Medan Selayang” Pada Tahun 2018.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholder Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. Vol.3 No.1, 47-45.

F. Pengakuan

Artikel ini merupakan skripsi yang diajukan sebagai syarat kelulusan S1 Administrasi Publik Universitas Nasional, dan sudah melalui ujian oleh tim penguji.